

PENGARUH MEDIA DALAM KONFLIK PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA BANDA ACEH DAN MEULABOH

Reni Juliani¹, Nurkhalis², Rena Juliana³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar

²Program Studi Sosiologi Universitas Teuku Umar

³Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teuku Dirundeng Meulaboh

Email: renijuliani@utu.ac.id, nurkhalis@utu.ac.id, renajuliana@staindirundeng.ac.id

Abstract

The media has now been used by politicians as campaign media to convey persuasive messages to the public. This is because media literacy has become a part of people's lives, so people can easily access information through the media, including information about the potential leaders they will vote for in elections. This study aims to elucidate the influence of the media on opposing political participation in the 2019 parliamentary elections in the cities of Banda Aceh and Meulaboh by questioning informants, including politicians, academics, political observers and the public. From this study, it emerged that the media played a major role in shaping identity politics. The topic of religion and race became the main topic that the media spread in the 2019 parliamentary elections in the cities of Banda Aceh and Meulaboh and that influenced the decision of the people to vote for their top candidates.

Keywords: Media, Conflict, Participation, Politics

A. PENDAHULUAN

Media merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi yang dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Media saat ini bahkan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari masyarakat yang haus akan informasi. *McQuail* menjelaskan ada beberapa peran media yaitu: Media dianggap sebagai jendela yang menjadikan khalayak dapat peristiwa yang sedang terjadi. Selain dianggap sebagai jendela, media juga merupakan sarana belajar yang berguna sebagai alat pembelajaran. Media juga menjadi cermin dari berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, kehadiran media sudah seharusnya dapat merefleksikan sesuai kenyataan yang ada. Media sebagai filter, menyaring segala informasi yang layak atau tidak untuk dipublikasikan. Media akan memilah informasi yang sesuai standar media tersebut. Media dianggap sebagai kompas yang berfungsi untuk menunjukkan arah dan menjadi penuntun atas berbagai ketidakpastian baik dalam pemberitaan atau informasi yang dipublikasikan. Media massa sebagai ruang guna transformasi segala bentuk informasi dan ide-ide kepada masyarakat, sehingga diberikan kesempatan untuk sebuah tanggapan yang disebut dengan *feedback*. Sehingga menjadikan media massa bukan sekadar sarana penyaluran informasi, tetapi juga menjadi partner komunikasi yang bersifat interaktif sehingga dibangun komunikasi yang dua arah (Nuryanti, 2018: 1180).

Saat media ini media menjadi senjata dengan pesan-pesan sebagai amunisi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif kepada masyarakat sehingga mereka terpengaruhi secara kognitif, afektif dan konatifnya. Bahkan pesan direkayasa sedemikian hingga sehingga dapat menggiring opini publik sesuai dengan tujuan media. Mengingat begitu besar power yang dimiliki media dalam mempengaruhi opini dan persepsi masyarakat, media sangat berguna pada saat pemilihan umum. Pemilihan umum tidak mungkin bisa terjadi tanpa media. Media digunakan

pemerintah sebagai alat sosialisasi kebijakan-kebijakan baru mengenai tata cara dan peraturan dalam memilih dan menginformasikan siapa saja kandidat yang akan berlomba dalam ajang demokrasi ini. Hal inilah yang mengakibatkan pemilihan umum sangat bergantung pada media.

Media hadir untuk menjadikan masyarakat mengetahui lebih banyak mengenai kandidat yang akan dipilihnya dan partai-partai politiknya. Selain itu media menjadi penuntun bagaimana cara memilih yang benar. Karena setiap periodenya, tata cara pemilihan umum akan berbeda dengan periode sebelumnya. Oleh sebab itu perlu sosialisasi yang sering dilakukan pemerintah melalui media.

Selain itu, media digunakan sebagai alat kampanye oleh kandidat pemimpin untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Mempengaruhi masyarakat dengan program-program yang dirancang guna kemajuan bangsa. Serta media sebagai alat penyebar janji-janji aktor-aktor politik untuk menarik hati masyarakat sehingga mereka memilih aktor politik tersebut pada saat pemilihan umum.

Pada penelitian ini ingin melihat bagaimana media dapat mempengaruhi konflik partisipasi politik pada pemilihan umum 2019 di Kota Banda Aceh dan Meulaboh. Hal ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi politik di Aceh pada pemilihan umum 2019 ini dan apa yang mengakibatkan suara dominan ada pada Prabowo bukan pada Jokowi pada pemilihan umum kali ini sedangkan kedua kandidat ini sama-sama gencar dalam mengampanyekan diri mereka di Aceh.

B. LITERATURE REVIEW

Media sebagai Alat Kampanye Aktor Politik

Kampanye dalam pemilihan umum merupakan ajang komunikasi publik. Pesan-pesan persuasif yang bertujuan untuk membujuk dan mempengaruhi khalayak menjadi amunisi utama menjelang pesta demokrasi rakyat. Kampanye bahkan digelar di berbagai titik dan lokasi guna menghalau segala penjuru dan pelosok di lokasi pemilihan nantinya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kampanye akan mengalami hambatan apabila dilakukan secara langsung. Oleh sebab itu perlu menghadirkan media dalam proses penyampaian pesan-pesan politik calon pemimpin kepada rakyatnya. Sehingga seakan tanpa media masyarakat akan mengalami kebutaan informasi.

Media dipilih sebagai alat kampanye dikarenakan media dapat menjangkau segala lini masyarakat. Berbagai media akan digunakan baik berupa media visual, audio bahkan media audio visual. Dengan adanya media, penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui visi dan misi kandidat yang akan dipilihnya. Penyandang disabilitas pendengaran contohnya dapat memperoleh informasi dari media-media visual dan cetak yang dengan mudah dapat mereka dapati di lingkungan tempat tinggal mereka seperti koran, pamflet, baliho, dan media visual lainnya.

Salah satu bentuk kampanye di media adalah iklan politik. Iklan politik akan terus membanjiri media televisi, radio dan media cetak lainnya selama proses kampanye. Bahkan media yang digunakan kampanye saat ini bukan saja media massa baik elektronik dan cetak, melainkan segala atribut yang dapat digunakan sebagai penyampain pesan seperti kendaraan umum yang menjelma menjadi pamflet berjalan, gedung-gedung pertokoan yang menjadi *billboard* baru, dan masih banyak lagi media-media lainnya yang digunakan sebagai alat kampanye politik.

Pada ajang pemilihan umum, media akan memperoleh keuntungan besar dikarenakan iklan politik dari para kandidat partai. Contohnya saja media percetakan pamflet dan baliho. Orderan akan meningkat begitu drastis pada masa kampanye dikarenakan kebutuhan yang sangat banyak mengingat pamflet dan baliho akan dipasang di setiap tempat di lokasi pemilihan. Hal ini yang

menjadi salah satu alasan mahal nya kampanye politik. Dana yang besar akan dihabiskan hanya untuk kampanye mengingat pentingnya kampanye dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan bagaimana peran media sebagai alat yang ampuh menyampaikan pesan akan terus digunakan di setiap ajang pemilihan umum walaupun akan menelak rupiah yang tidak sedikit.

Partisipasi Politik di Aceh Meningkat

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang sangat mendasar dalam proses demokrasi. Partisipasi politik sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Apabila masyarakat telah mempunyai kesadaran akan partisipasi yang tinggi, maka negara demokrasi akan terwujud dan proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik. Perkembangan pembangunan politik yang sehat akan sangat berdampak terhadap perkembangan bangsa dan negara. Asumsi yang sangat fundamental dalam demokrasi (partisipasi) yaitu yang paling tahu yang terbaik untuk dirinya adalah dirinya sendiri. Dikarenakan segala keputusan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat oleh sebab itu masyarakat harus ikut andil dalam menentukan konten keputusan yang dirancang pemerintahnya. Mereka tidak boleh buta dan tuli akan politik karena segala masalah politik akan menyangkut kehidupan mereka sendiri. Kegiatan masyarakat dapat berupa memengaruhi isi kebijakan umum atau ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Yuliantina, 2016:1-2).

Partisipasi politik menjadi aspek yang sangat penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam legitimasi politik. Hal ini menyatakan bahwa adanya kondisi dimana segala jalannya keputusan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Masyarakat yang ikut melibatkan diri mereka dalam kegiatan politik dan mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh kesadaran mereka mengenai politik dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dapat menentukan masa depan bangsa dikarenakan adanya partisipasi politik mereka pada pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin negeri merupakan bentuk kesadaran politik dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, partisipasi apatis dan partisipasi militan radikal (Setiadi dan Kolip, 2013: 154).

Pada Pemilihan Gubernur Aceh tahun 2017, partisipasi masyarakat Aceh berjumlah 72, 28 persen atau sebanyak 2.414.801 suara sah dari 3.431.582 pemilih. Jadi secara keseluruhan ada 1.016.781 suara yang tidak sah pada saat itu. Apabila melihat perbandingan Jumlah partisipasi masyarakat Aceh pada tahun ini dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, jumlah partisipasi masyarakat dalam ajang politik ini menurun. Menurut data yang diperoleh, pada tahun 2012, jumlah masyarakat Aceh yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 75,73 persen. Sedangkan untuk tahun 2017 hanya 62,7 persentase partisipasi masyarakat dalam memilih. Hal ini menyatakan tidak tercapainya target jumlah partisipasi masyarakat yang diharapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yaitu sebanyak 75 persen (Afif, 2017). Ismail (2017) menambahkan bahwa sebanyak 57.536 atau 37,3 persen dari jumlah keseluruhan data pemilih Tetap (DPT) Banda Aceh yaitu 151.105 orang, memilih tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan daerah walikota/wakil walikota Banda Aceh dan gubernur/wakil gubernur Aceh tahun 2017.

Pada pemilihan bupati di Aceh Barat, Bahagia Idris (Umar, 2017) menyebutkan dari hasil rekapitulasi KIP, Ketua KIP Aceh Barat bahwa Ramli MS dan Banta Puteh Syam memperoleh suara ungu dengan perolehan jumlah suara sebanyak 52.538 suara. Ramli MS dan Banta Puteh Syam mampu memenangkan suara lebih dari separuh suara yang masuk. Sedangkan kandidat lain yang selisih suara hampir mendekati Ramli adalah Teuku Alaidinsyah dan Kamaruddin dengan

jumlah perolehan suara sebanyak 48.201 dan di posisi terakhir, Fuad Hadi dan Muhammad Arief mendapat 4.215 suara. Pada pemilihan pilkada bupati Aceh Barat tahun 2017, jumlah total suara yang masuk sebanyak 104.954.

Pada pemilihan umum serentak tahun 2019, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah partisipasi politik masyarakat dalam mempergunakan hak suaranya pada pesta demokrasi. Agusni (Agse, 2019) sebagai Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik di Aceh pada Pemilihan Umum 2019 telah melampaui target yang diharapkan sebelumnya. Partisipasi pemilih mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Jumlah masyarakat Tanah Rencong yang mencoblos mencapai 79 persen. Jika melihat jumlah suara pada pemilihan umum 2014 lalu yang hanya mencapai 72 persen.

Pengaruh Media dalam Konflik Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Banda Aceh dan Meulaboh

Konflik secara sosiologis dapat diartikan sebagai proses terjadinya interaksi sosial, di mana terdapat dua orang atau lebih, atau dua kelompok yang bertetangan dikarenakan memiliki perbedaan sudut pandang dalam berfikir, memiliki tujuan hidup yang berbeda, kepentingan-kepentingan yang berbeda menyebabkan benturan sehingga pertentangan terjadi dan hal lainnya yang menjadi penyebab konflik memiliki cita-cita yang berbeda sehingga susunan tata cara kehidupan akan berbeda. Selain itu banyak hal yang bisa menjadi penyebab konflik. Konflik terjadi bisa karena adanya gangguan dalam hubungan sosial seperti adanya kekerasan baik verbal maupun fisik oleh pribadi atau kelompok di dalam lingkungan pergaulannya. Konflik tidak bisa dihindari, konflik akan selalu ada di setiap penjuru dunia. Selama masih ada masyarakat, konflik juga akan tetap ada dan konflik akan hilang apabila masyarakat sudah tidak ada lagi (Hasbulla, 2014:5).

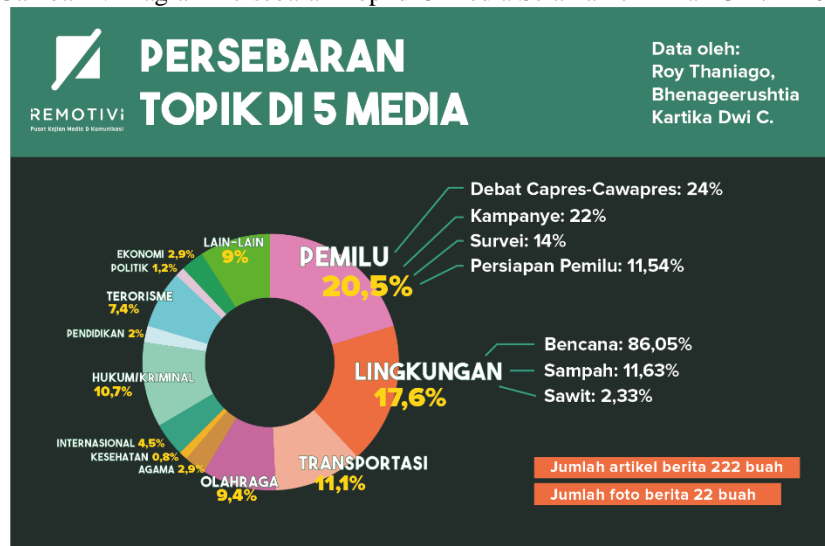
Pemahaman mengenai konflik secara mendetil di atas telah menjelaskan bagaimana kondisi konflik dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi hanya karena perbedaan pendapat sehingga terjadi pertentangan-pertentangan tertentu. Di Aceh juga sering terjadi konflik. Pada masa pemilihan umum, konflik dalam partisipasi politik tidak bisa dihindari karena akan ada banyak partai yang bersaing untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Pada masa setelah perdamaian MoU Helsinki, kekerasan mewarnai pemilihan kepala daerah di Aceh. Kekerasan dilakukan oleh pribadi maupun kelompok tertentu yang mendukung salah satu calon kandidat pemimpin daerah. Eskalasi konflik politik ini terus merajalela dan meluas dikarenakan pendukung setia salah satu kandidat melakukan doktrin kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak memahami cara berdemokrasi yang baik dan benar sehingga cara-cara kekerasan yang dimainkan untuk memaksa calon lainnya mundur dan calon yang diusungnya dapat menang tanpa ada hambatan. Namun kondisi demokrasi Aceh saat ini semakin membaik. Masyarakat Aceh semakin cerdas dalam berpartisipasi di pesta demokrasi. Kekerasan tidak lagi menjadi doktrin yang diterapkan untuk mendukung calon pemimpin tertentu. Namun cara-cara doktrin lainnya diteapkan dengan menyelipkan isu-isu identitas di setiap media-media sebagai alat untuk kampanye dan menjadi senjata penting dalam pemilu 2019 kali ini.

Kemampuan media dalam mengonstruksikan pemikiran masyarakat salah satunya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa seputar pemilihan umum. Apabila pembentukan opini utama masyarakat dilandaskan dari informasi-informasi yang dipublikasikan di media, media seperti ini sesuai dengan teori jarum suntik atau sering disebut *Hypodermic Needl Theory* yang menganggap pesan-pesan yang akan disampaikan media akan selalu diterima oleh khalayak. Perumpamaan jarum suntik disini bagaikan cairan yang dimisalkan sebagai pesan yang disuntukkan langsung ke nadi khalayak sehingga cairan tersebut langsung masuk ke tubuh khalayak. Oleh sebab itu pesan akan serta merta diterima oleh khalayak.

Dalam pemilu 2014, media massa menjadi media yang paling dicari oleh masyarakat yang antusias ingin mengetahui proses dan jalannya pemilihan umum. Mereka akan giat mencari

informasi yang ada di media sebelum, saat dan setelah pemilihan umum diselenggarakan. Salah satu peranan media dalam menginformasikan peristiwa-peristiwa pemilihan umum adalah adanya pengenalan para kandidat yang akan bertanding di ring pesta demokrasi. Selain itu media juga menjadi tempat sosialisasi program-program partai yang mereka usung dan mengampanyekan visi dan misi mereka melalui media. Media mempunyai power yang tidak diragukan lagi dalam hal mempengaruhi dan membentuk opini publik oleh sebab itu media sering dijadikan alat tawar menawar politik selama masa kampanye. Media yang besar akan ditawar dengan harga yang tinggi karena telah mempunyai nama dan kesan sendiri di mata khalayak. Hal ini juga dimanfaatkan media guna memperoleh keuntungan lebih selama masa pemilu.

Gambar 1. Diagram Persebaran Topik di 5 Media Selama Pemilihan Umum 2019



Sumber: Thaniago, 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebanyak 20,5% media menyebarkan informasi mengenai pemilihan umum. Bahkan bagian ini merupakan bagian terbesar dari beberapa topik lainnya. Topik seputaran pemilihan umum paling banyak berisi mengenai debat calon presiden dan wakil presiden. Masyarakat akan terus antusias melihat bagaimana kedua kandidat bertarung dan saling beradu argumen di media. Isu lainnya yang tidak kalah besar persentasenya adalah mengenai kampanye. Sebanyak 22 % topik tentang pemilihan umum berisikan kampanye-kampanye para aktor politik. Kampanye-kampanye di media tidak hanya menyajikan kampanye-kampanye yang sehat, media juga dimanfaatkan sebagai alat menjatuhkan lawan dengan penyebaran kampanye hitam (*black campaign*).

Kampanye hitam yang mewarnai pemilihan umum 2019 ini berlatarkan informasi-informasi hoaks yang kebenarannya masih harus dipertanyakan lagi. Henri Subiakto, staf ahli Menkominfo berbicara mengenai hoaks menjelang Pemilu (Sucahyo, 2019) menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah berita-berita hoaks yang tersebar di media. Hal ini serupa seperti apa yang terjadi pada Pilkada DKI baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2017. Hoaks seakan tidak bisa dipisahkan lagi dan telah menjadi bagian dalam setiap pesta demokrasi rakyat di negara ini. Namun ternyata hoaks bukan saja terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara-negara lainnya. Hoaks dijadikan alat propaganda dengan tujuan menyebarkan isu-isu yang memprovokasi. Di Amerika yang diprovokasi melalui hoaks adalah masyarakat kulit putih. Di Brasil, kata Henri, kelompok masyarakat Katolik yang menjadi sasaran. Sedangkan di Indonesia, hoaks digunakan untuk mempengaruhi suara mayoritas muslim. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. Oleh sebab itu pemerintah dan organisasi-organisasi Islam

seperti Muhammadiyah, NU dan yang lain, bekerja sama untuk memberantas hoaks sekaligus menjadikan masyarakat sadar perihal bahaya hoaks.

Politik Islam menjadi Budaya Politik di Aceh

Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang melakukan penerapan syari'at Islam. Hal inilah yang menjadikan Aceh berbeda dan istimewa apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan perpolitikan di Aceh, masyarakat Aceh selalu memimpikan pemimpin yang mempunyai agama yang kuat. Apabila melihat dalam kacamata Syari'at, maka masyarakat Aceh menunggu datang seorang pemimpin yang membawa perubahan Aceh berlandaskan nilai-nilai Syari'at (Kurdi, 2011:193).

Dalam sejarah Perang Aceh, Islam telah memainkan peran yang sangat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di jiwa masyarakat Aceh untuk mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajah dari penjuru dunia. Ada tiga komponen utama yang memberi inspirasi terhadap oposisi yang di luar dugaan Belanda itu: para ulama, para uleebalang dan sultan. Di antara ulama, uleebalang dan sultan, yang memiliki pengaruh terkuat adalah para ulama, bahkan tanpa disangka-sangka pengaruh terlemah ada pada sultan. Secara logika akan rancu apabila seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang paling lemah terhadap rakyatnya. Namun hal semacam ini dapat diterima oleh akal sehat apabila melihat bagaimana Islam menjadi agama masyarakat Aceh sehingga pengaruh ulama memang yang paling kuat dikarenakan mereka orang yang paling dipercaya ucapannya dan perbuatannya (Amal, 2004:17).

Dalam sejarah politik di Aceh, sejak zaman kerajaan Aceh berdiri hingga saat ini, ulama masih memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan bagaimana sangat erat kaitan Islam dan politik masyarakat Aceh. Islam menjadi acuan dalam memilih pemimpin. Aturan tidak tertulis bahwa aktor politik di Aceh harus beragama Islam bukanlah hal yang baru. Hal ini dilakukan juga untuk menyelaraskan tujuan masyarakat Aceh untuk membangun budaya masyarakat Muslim di tengah arus globalisasi. Sehingga secara garis besar, masyarakat Aceh menolak aktor politik yang beragama non muslim karena dianggap akan melunturkan budaya Islam sebagai identitas masyarakat Aceh.

Walaupun Aceh saat ini telah damai. Politik identitas masih mewarnai di setiap ajang pertarungan politik. Di setiap daerah di Aceh, Partai Lokal Aceh bahkan hampir selalu unggul apabila dibandingkan dengan partai nasional yang ada. Hal inilah yang menjadikan partai-partai nasional mencari cara untuk mengambil hati masyarakat Aceh salah satunya dengan mengawinkan politik dengan Islam. Apabila partai lokal sudah mendominasi di Aceh dikarenakan sejarah perdamaian panjang Aceh melalui perjanjian MoU Helsinki. Partai-partai nasional juga terus memijakkan kakinya sekuat mungkin di Aceh dengan menyelaraskan visi dan misinya dengan perjanjian perdamaian tersebut yaitu syari'at Islam. Islam masih dijadikan isu untuk dibisikkan ke telinga masyarakat Aceh. Aktor politik yang akan menjadi pemimpin masa depan akan dilirik oleh masyarakat Aceh apabila aktor tersebut dekat dengan Islam.

Seperti yang telah disebutkan di atas. Perpolitikan di Aceh dari zaman dahulu telah diwarnai dengan politik identitas yang sangat kental. Islam yang menjadi penekanan penting dalam politik di Aceh. Pada masa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mereka menuntut wilayah Aceh dijadikan wilayah Islam. Bahkan bukan saja di Aceh, beberapa daerah membentuk kelompok-kelompok yang mengusung dinamika identitas keagamaan mereka untuk menyatakan identitas agama mereka. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu kelompok seperatis yang berasal dari Aceh. Kelompok ini bertujuan untuk membentuk kembali wilayah Aceh yang sesuai dengan Islam. Namun kemunculan kelompok ini menjadi catatan sejarah bagi Aceh sendiri. Syari'at Islam di Aceh di sahkan menjadi aturan yang berlaku di Aceh walaupun untuk mencapai hal tersebut menelan korban yang tidak sedikit jumlahnya dikarenakan konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut disebabkan karena ingin mempertahankan identitas. Sehingga politik identitas tidak bisa dipisahkan dari Aceh.

Hubungan negara dalam perkawinan antara politik dan agama merupakan contoh dari keduanya yang berdampingan dimana mereka memiliki peran masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa tidak selalu agama dan negara akan menghasilkan peran positif dalam ajang politik. Bahkan dengan adanya perkawinan agama dan politik dapat menimbulkan konflik baru salah satunya konflik politik identitas. Dimana setiap mereka akan memilih pemimpinnya sesuai agama yang mereka pegang. Iklim Pemilu 2014 dan menjelang Pemilu 2019 misalnya, isu agama sangat kental mewarnai perpolitikan di Indonesia. Isu agama seperti kacang goreng yang menjadi renyah diperbincangkan disetiap diskusi publik. Hal ini dimanfaatkan sebagai pemulus jalan untuk memperoleh kemenangan kursi pemerintahan. Dalam Pemilu 2019 masyarakat dituntut untuk harus tetap waspada dalam terpaan agama yang terpolitisasi. Menjadi penting untuk memformulasikan agama dan negara pada posisi ideal, sehingga Pemilu 2019 berjalan dengan baik dan kondusif tidak keluar dari marwah demokrasi untuk negeri (Saputro, 2018:111).

Peristiwa yang terjadi di negara-negara Muslim di atas juga terjadi di Aceh. Islam masih dijadikan senjata untuk mencapai kemenangan politik di Aceh. Aceh dan Islam tidak bisa dipisahkan. Terlihat jelas bahwa politik identitas di Aceh dimainkan dengan mengatasnamakan agama pada Pemilihan Umum 2019 ini. Banyak propaganda dan kampanye-kampanye di media yang mengatasnamakan Islam. Isu SARA menjadi acuan dalam isi kampanye aktor politik. Seakan identitas aktor politik dijadikan senjata untuk melawan aktor politik lainnya. Padahal Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi yang harus dirayakan secara demokrasi. Demokrasi mengedepankan hak asasi manusia yang harus netral dan tidak seharusnya mengedepankan SARA. Apalagi menggunakannya sebagai kendaraan menuju kemenangan.

Isu SARA Mewarnai Media pada Pemilihan Umum 2019

Isu SARA dan ideologi komunis menjadi isu yang dihembuskan di berbagai media dalam penghelatan politik saat ini. Hal ini seharusnya tidak mencuat malah menjadi senjata bagi calon pemimpin untuk berkampanye ke seluruh pelosok Indonesia. Namun isu tersebut dimanfaatkan untuk menjatuhkan salah satu lawan dalam pertarungan politik ini. Pemilu dijadikan arena pertandingan bukan ajang demokrasi yang selama ini diimpikan rakyat. Demokrasi tidak akan terjadi apabila hanya mengedepankan ras, etnis, golongan atau agama tertentu.

Isu SARA dan politik identitas akan berdampak pada masyarakat Aceh dikarenakan budaya politik yang dianut oleh masyarakat Aceh erat dengan politik identitas. Ideologi komunis dianggap “anti Islam” sudah tentu masyarakat Aceh akan menolak paham tersebut. Mereka akan lebih memilih calon yang mendukung agama yang telah mereka anut yaitu Islam sebagai landasan berfikir dan bertindak. Diibaratkan seperti kembar siam yang terus menempel, Aceh dan Islam tidak bisa dipisahkan. Terlihat jelas hal ini dimanfaatkan pada pemilu 2019 ini. Politik identitas di Aceh dimainkan dengan mengatasnamakan agama. Pesta demokrasi sudah seharusnya berjalan tanpa memberatkan salah satu pihak, netral dan adil seperti semboyannya “Jurdil” yaitu jujur dan adil. Namun lain halnya yang terjadi, kondisi perpolitikan Indonesia masih dipengaruhi isu agama dan etnis. Media menjadi penyokong utama penyebaran isu-isu tersebut. Apalagi aktor-aktor politik memanfaatkan media untuk *black campaign* sebagai alat memperlulus jalan kemenangan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dengan mewawancarai informan-informan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyebutkan Pemilihan Umum 2019 walaupun dilakukan serentak di Aceh khususnya di Banda Aceh dan Meulaboh, tetapi perpolitikan pemilihan presiden lebih menyedot perhatian dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Dalam pesta demokrasi ini, ada kecenderungan pemilih untuk memilih calon pemimpinnya didasari oleh agama dan kesukaan calon pemimpin. Dalam pemilihan presiden kali ini yaitu kedua calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua calon pemimpin Indonesia ini ternyata sama-sama mengenal Aceh dan dikenal oleh masyarakat Aceh. Dalam sejarah hidup Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama Jokowi, Jokowi pernah tinggal di Aceh bahkan memiliki

orang tua angkat di Aceh. Jokowi selalu mengampanyekan bahwa Aceh adalah kampung halamannya.

Apabila dilihat dari benang merah Jokowi dengan Aceh besar kemungkinan suara Jokowi yang akan mendominasi pada pemilihan Umum 2019 ini dan seharusnya Jokowi akan meraup suara lebih besar dibandingkan Prabowo. Namun yang terjadi malah sebaliknya suara yang diperoleh Jokowi hanya 19 persen berbeda jauh dengan Prabowo yang pernah menjadi Komandan Pasukan Khusus di Aceh memperoleh suara 81 persen. Hal inilah yang menjadi polemik yang terus berkembang di dalam masyarakat. Isu SARA diangkat menjadi topik utama dalam kampanye. Inilah politik identitas yang sedang dimainkan oleh Jakarta. Identitas Jokowi sering dikaitkan dengan China. Jokowi disinyalir merupakan keturunan China selain itu isu-isu komunis dan PKI (Partai Komunis Indonesia) kembali mencuat membuat Jokowi meraup suara lebih sedikit daripada lawannya. Selain itu Jokowi kerap dianggap “anti Islam” dan mendukung LGBT. Beda halnya dengan Prabowo, walaupun sering diidentikkan dengan “pendosa masa lalu” dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang pernah dituduhkan kepada Prabowo, tidak membuat suara Prabowo di Aceh menjadi kalah dari Jokowi. Apalagi peran ulama-ulama kondang seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, AA Gym, Alm KH. Arifin Ilham yang dipelopori oleh Imam Besar Habib Rizieq yang cenderung memilih Prabowo daripada Jokowi. Secara langsung hal ini menambah kuat pegangan masyarakat Aceh yang membuktikan cinta kepada ulama untuk mengikut pilihan ulama dan menjadi penyebab utama Prabowo lebih unggul dari pada Jokowi di Aceh.

C. PENUTUP

Media sangat berperan besar dalam proses penyebaran isu politik identitas. Isu agama dan ras menjadi isu utama yang disebar oleh media dalam pemilihan umum 2019 di kota banda aceh dan meulaboh yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih kandidat pemimpinnya. Selama pemilu, media paling banyak mempublikasikan informasi dengan topik-topik yang berkaitan dengan pemilu. Hoaks tidak lagi dapat terbendung dan menjadikan isu-isu tentang agama dan ras semakin mulus disebar di media. Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat. Masyarakat Aceh yang rasionalnya diprediksi akan lebih banyak memilih Jokowi malah memilih Prabowo dikarenakan isu politik identitas. Jokowi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Aceh karena pernah bekerja di Aceh dan mempunyai orang tua angkat di Aceh harus berlapang dada menerima kekalahan suara dari pada lawannya. Dapat disimpulkan bahwa media sangat berpengaruh dalam konflik partisipasi politik di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh dan Meulaboh.

Daftar Pustaka

Agse. 2019. Efek Pemilu Serentak Partisipasi Pemilih di Aceh Lampau Target. <https://news.detik.com/berita/d-4548893/efek-pemilu-serentak-partisipasi-pemilih-di-aceh-lampau-target>. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.

Afif. 2017. Angka Partisipasi dalam Pilgub Aceh 72,28 Persen. <https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-partisipasi-dalam-pilgub-aceh-7228persen.html>. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.

Amal, Taufik Adnan. 2004. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Hasbullah. 2014. Sejarah Konflik, Budaya Politik, Dan Ketegangan Di Aceh Menjelang Pemilu 2014. *Haba* (70): 5-12.

Ismail, Asnawi. 2017. Golput Banda Aceh Capai 57536 Orang. <http://aceh.tribunnews.com/2017/02/22/golput-banda-aceh-capai-57536-orang>. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.

Kurdi, Muliadi. 2011. *Islamic Politics Idealism In Aceh An Investigation into Academician and Politician Points of View*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS).

Muwarni, Endah dan Maria Advenita Gita Elmada. 2019. Social Media Literacy and Politic Participation Early Voter in Tangerang. *Jurnal Sinergitas PkM & CSR*, 3 (2): 56-65.

Nasrudin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin. 2018. Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1 (1): 34-47.

Nuryanti. 2018. Peran Media Massa dalam Pemilihan Umum. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4 (3): 1179-1190.

Saputro, Agus. 2018. Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *Asketik*, 2 (2): 111-120.

Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosilogi Politik*. Kencana: Jakarta.

Sucahyo, Nurhadi. 2019. Hoax Makin Merajalela Jelang Pemilu. <https://www.voaindonesia.com/a/hoax-makin-merajalela-jelang-pemilu/4835646.html>. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.

Thaniago, Roy. 2019. Peran Media dalam Politik Omong Kosong: Studi Atas Headline Lima Surat Kabar. <http://www.remotivi.or.id/amatan/519/Peran-Media-dalam-Politik-Omong-Kosong:-Studi-Atas-Headline-Lima-Surat-Kabar>. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.

Umar, Raja. 2017. Hasil Rekapitulasi Suara di Aceh Barat, Calon Pertahanan Kalah. <https://regional.kompas.com/read/2017/02/22/20231671/hasil.rekapitulasi.suara.di.aceh.barat.calon.petahana.kalah>. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.

Yuliantina, Maya. 2016. Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.